

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA		URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	
1	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	1.1.	DPPKBP3A	1	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>
					Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
					<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota</b>
					Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
					<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota</b>
					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota
				2	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>
					<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota

					<p>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota</p>
					<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota</p>

					<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota
				<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>
					<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>
					Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota
					Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota

					<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah</b>
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
				<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>
					<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota</b>
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota
					<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota</b>
					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah

				5	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>
					<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota
					<b>Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota

					Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota
					<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>
					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten / Kota
2	Keluarga Berencana	1.2.	DPPKBP3A	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>
					<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetak dan Panggandaan
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>
					<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>
					Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota
					Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Non Formal
					<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Pendudukan Cakupan Daerah Kabupaten / Kota</b>
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
					Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
					Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
				3	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>
					<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>
					Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja



				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
				Pengendalian Program KKBPK
				<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
				<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota</b>
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

					Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
					Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
					Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
					<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan</b>
					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
				3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>
					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

					Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
					Penyedia Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan
					<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui</b>
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)
<b>JUMLAH</b>					

ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN
Rp 804,640,900	Rp 786,568,595		100%		
Rp 208,400,000	Rp 207,829,300		100%		
Rp 208,400,000	Rp 207,829,300		100%		
Rp 486,401,850	Rp 474,837,195		100%		
Rp 375,534,900	Rp 365,829,615		100%		
Rp 110,866,950	Rp 109,007,580		100%		
Rp 109,839,050	Rp 103,902,100		100%		
Rp 109,839,050	Rp 103,902,100		100%		
Rp 560,763,200	Rp 406,865,490		100%		
Rp 136,526,600	Rp 92,474,060		100%		
Rp 136,526,600	Rp 92,474,060		100%		Masih kesulitan membantu tetangga yang mengalami kdrt.

					Kesulitan orang tua membatasi anak menggunakan gadget dan masih kurang memahami apa itu TPPO
					Masih sulit membedakan TPPO karena kebanyakan kasus yang ada dimasyarkat banyak pernikahan usia dini
					OPD terkait belum terlalu paham tugasnya sebagai Gugus Tugas TPPO
Rp 103,665,000	Rp 56,025,600		100%		Belum Maksimalnya Koordinasi dengan OPD, LM, DUA, TA dan belum Optimalnya PATBM yang di bentuk di kampung dalam melaksanakan tugas dan Fungsi dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus.di Kampung dan Kecamatan
Rp 103,665,000	Rp 56,025,600		100%		Meningkat Kasus karna mulai mengertinya masyarakat khususnya perempuan untuk dapat melaoprkan kasus kekerasan yang di alami kepada lembaga yang menanganani KtP
					Belum semua lapisan masyarakat yang teredukasi tentang pencegahan Tindak Kekerasan terdapat Perempuan dan Anak

Rp 320,571,600	Rp 258,365,830		100%		Tidak Ada
Rp 320,571,600	Rp 258,365,830		100%		
Rp 531,116,476	Rp 454,899,125		97.87%		
Rp 276,352,000	Rp 224,356,499		100%		
Rp 176,357,400	Rp 142,994,599		100%		Ke depannya lebih memperhatikan komunikasi dan kordinasi kelengkapan acara
					Sarana prasarana yang kurang mendukung
					Tempat acara yang kurang kondusif
					Kurangnya kordinasi dan komunikasi antar pihak
Rp 99,994,600	Rp 81,361,900		100%		Kurangnya keinginan dan partisipasi dari keluarga untuk mau hadir di
					Sulit dalam menghadirkan keluarga suami dan istri, Kegiatan di harapkan
					Kurangnya keinginan dan partisipasi dari keluarga untuk mau hadir di
					Sulit dalam menghadirkan keluarga suami dan istri, Kegiatan di harapkan

Rp 254,764,476	Rp 230,542,626		95.74%		
Rp 204,764,476	Rp 180,542,626		91.49%		Pada bulan September tenaga Administrasi mengundurkan diri,
					Pada bulan September tenaga Administrasi mengundurkan diri,
Rp 50,000,000	Rp 50,000,000		100%		Penyelenggaraan Pelatihan belum di fasilitasi oleh Kementerian PPPA atau Dinas Pengampu PPA Kab. Kota
Rp 562,224,550	Rp 427,844,680		100%		
Rp 352,452,100	Rp 245,382,090		100%		
Rp 293,849,500	Rp 241,103,490		100%		Tidak Ada
Rp 58,602,600	Rp 4,278,600		100%		Dana Kegiatan Tidak Terrealisasi maksimal , SK Gugus Tugas tidak di lengkapi dengan SK pembayaan Honor Gugus Tugas dan Belum terjadwa pembuatan SK Honor di bagian Hukum
Rp 209,772,450	Rp 182,462,590		100%		
Rp 209,772,450	Rp 182,462,590		100%		Tempat terlalu kecil sehingga kapasitas peserta kegiatan terbatas

					Secara Umum tidak ada kendala atau permasalahan pada saat kegiatan pelatihan 2P semua kegiatan dapat berjalan lancar dan tertib
Rp 1,230,208,138	Rp 824,961,177		98.15%		
Rp 225,624,900	Rp 182,731,163		100%		
Rp 64,477,700	Rp 60,372,300		100%		Minimnya anggaran sehingga kegiatan sharing dengan dana kas FPABK, Dan Belanja umum ABK
					Terbatasnya Anggaran sehingga tidak semua orang Tua ABK mendapat
Rp 161,147,200	Rp 122,358,863		100%		Aktivis PATBM sudah banyak yang pindah , sehingga perlu ada Revisi
Rp 788,983,188	Rp 514,935,838		94.44%		
Rp 748,027,088	Rp 484,248,376		88.89%		Jumlah Kasus Melebihi dari target kasus yang di rencanakan untuk di



Rp 40,956,100	Rp 30,687,462		100%		Undangan yang diharapkan hadir 100 orang, yang hadir 70 orang, materi tidak tersampaikan semua mengingat , undangan jam 08.00 Wita, Pembukaan jam 9 , sehingga waktu penyampaian materi terbatas dan cara Pemateri menyampaikannya lambat, sehingga tujuan Rakoor tidak tersampaikan
<b>Rp 215,600,050</b>	<b>Rp 127,294,176</b>		<b>100%</b>		
Rp 215,600,050	Rp 127,294,176		100%		Peserta yang ikut pelatihan tidak bisa aktif kerna kalau ada kasus yang harus diselesaikan mereka ijin keluar kemudian masuk kembali
<b>Rp 8,316,507,016</b>	<b>Rp 7,347,092,022</b>		<b>84.72%</b>		
<b>Rp 140,211,000</b>	<b>Rp 139,374,266</b>		<b>100.00%</b>		
Rp 36,800,000	Rp 36,800,000		100%		
Rp 12,498,000	Rp 12,377,900		100%		
Rp 90,913,000	Rp 90,196,366		100%		

<b>Rp 6,210,539,216</b>	<b>Rp 5,813,864,245</b>		<b>100%</b>		
Rp 5,446,263,920	Rp 5,070,832,447		100%		
Rp 570,919,296	Rp 568,288,798		100%		
Rp 193,356,000	Rp 174,743,000		100%		
<b>Rp 153,580,000</b>	<b>Rp 150,522,700</b>		<b>100%</b>		
Rp 46,430,000	Rp 45,000,000		100%		
Rp 107,150,000	Rp 105,522,700		100%		
<b>Rp 764,291,800</b>	<b>Rp 720,913,486</b>		<b>100.00%</b>		
Rp 11,989,500	Rp 11,978,500		100%		
Rp 309,487,400	Rp 273,849,800		100%		
Rp 38,410,300	Rp 37,448,000		100%		
Rp 145,589,900	Rp 145,229,000		100%		
Rp 31,314,700	Rp 29,616,000		100%		
Rp 7,500,000	Rp 6,390,000		100%		
Rp 220,000,000	Rp 216,402,186		100%		
<b>Rp 467,132,000</b>	<b>Rp -</b>		<b>0.00%</b>		
Rp 467,132,000	Rp -		0.00%		
<b>Rp 145,979,000</b>	<b>Rp 122,448,311</b>		<b>100%</b>		
Rp 3,999,000	Rp 900,000		100%		
Rp 141,980,000	Rp 121,548,311		100%		
<b>Rp 434,774,000</b>	<b>Rp 399,969,014</b>		<b>93.06%</b>		

Rp 323,774,000	Rp 301,839,014		79.17%		
Rp 51,000,000	Rp 43,445,000		100%		
Rp 60,000,000	Rp 54,685,000		100%		
<b>Rp 609,920,850</b>	<b>Rp 551,730,361</b>		<b>100%</b>		
<b>Rp 402,472,050</b>	<b>Rp 376,338,306</b>		<b>100%</b>		
Rp 282,160,800	Rp 264,855,506		100%		
Rp 120,311,250	Rp 111,482,800		100%		
<b>Rp 207,448,800</b>	<b>Rp 175,392,055</b>		<b>100%</b>		
Rp 123,089,250	Rp 105,338,755		100%		
Rp 3,750,000	Rp 3,750,000		100%		
Rp 80,609,550	Rp 66,303,300		100%		
<b>Rp 4,800,906,274</b>	<b>Rp 3,863,731,875</b>		<b>76.38%</b>		
<b>Rp 835,047,774</b>	<b>Rp 648,897,083</b>		<b>69.74%</b>		
Rp 4,080,000	Rp -		0%	4 (empat) Balai Penyuluhan KB di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Berau	Anggaran di DPA tidak mencukupi untuk pengadaan WIFI di 4 (empat) Balai Penyuluhan KB di Kabupaten Berau

Rp 25,000,000	Rp 21,129,000		80.00%	5 Momentum	Anggaran di DPA terserap untuk 4 ( empat ) momentum
Rp 70,637,000	Rp 69,108,100		100%		
Rp 199,793,000	Rp 72,990,000		38.46%		1.Perubahan sistem keuangan dari bendahara pengeluaran menjadi ke bendahara pembantu tiap bidang 2. Pebagian uang UP yang tidak sama, 3. Kurangnya koordinasi antar bidang lingkup BKKBN
Rp 495,561,774	Rp 456,424,983		100%		
Rp 39,976,000	Rp 29,245,000		100%		
<b>Rp 528,000,000</b>	<b>Rp 438,000,000</b>		<b>87%</b>		
Rp 528,000,000	Rp 438,000,000		87%	2640 PPKBD & SUB PPKBD	Tidak adanya Laporan dari kader PPKBD & SUB PPKBD yang disampaikan sehingga tidak dapat
<b>Rp 2,920,456,500</b>	<b>Rp 2,500,754,792</b>		<b>95.43%</b>		
Rp 89,280,300	Rp 88,500,584		91.30%		Tidak Ada
Rp 280,261,700	Rp 191,161,000		81.28%		Juknis Turun di Tahun Berjalan

Rp 2,090,364,000	Rp 1,775,946,544		100%		
Rp 10,194,500	Rp 10,158,500		100%		Untuk Operasional ke Faskes terkendala Biaya kurang dengan target Faskes
Rp 170,190,000	Rp 164,659,300		100%		Peralatan Peraga (Phantom) blm mencukupi
Rp 280,166,000	Rp 270,328,864		100%		Tidak Ada
<b>Rp 517,402,000</b>	<b>Rp 276,080,000</b>		<b>53.33%</b>		
Rp 517,402,000	Rp 276,080,000		53.33%		1.Perubahan sistem keuangan dari bendahara pengeluaran menjadi ke bendahara pembantu tiap bidang 2. Pebagian uang UP yang tidak sama, 3. Kurangnya koordinasi antar bidang lingkup BKKBN
Rp 2,089,859,872	Rp 1,751,183,138		97.22%		
<b>Rp 1,928,417,550</b>	<b>Rp 1,597,788,706</b>		<b>94.44%</b>		

Rp 592,685,050	Rp 533,020,220		100%		-Masih rendah nya anggota keluarga menjadi anggota BKB dan Ber KB dikarenakan Rendahnya SDM. '- Masih rendahnya kesadaran keluarga yang memiliki Lansia untuk mengikuti Kelompok BKL '- masih rendahnya anggota keluarga yg memiliki Remaja mengikuti Kelompok BKR sehingga masih tingginya pernikahan dibawah umur '- Rendah Jumlah PUs yang BER KB Mengikuti Kelompok UPPKA
Rp 1,241,510,000	Rp 973,159,925		83.33%		
Rp 94,222,500	Rp 91,608,561		100%		
<b>Rp 161,442,322</b>	<b>Rp 153,394,432</b>		<b>100%</b>		
Rp 161,442,322	Rp 153,394,432		100%		
<b>Rp 19,506,147,276</b>	<b>Rp 16,414,876,463</b>		<b>94.93%</b>		

**UPAYA MENGATASI  
PERMASALAHAN**


Perlu Sosialissas kembali

Perlu Sosialisasi kembali
Perlu Sosialisasi kembali
Evaluasi Kembali Tugas Gugus Tugas
Lebih Masif lagi untuk melakukan Koordinasi dengan seluruh OPD, LM, DU, TA, PATBM di semua Kampung dan Kecamatan
Meningkat Kasus karena mulai mengertinya masyarakat khususnya perempuan untuk dapat melaporkan kasus kekerasan yang di alami kepada lembaga yang menangani KtP
Melakukan Kerjasama dengan PUSPAGA dan OPD yang terkait dan lintas sektoral dalam upaya Sosialisasi dan Pelatihan tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus KtPA



Belum ada papan nama SRA
Dari peserta menginginkan kegiatan Pelatihan keluarga 2P
Kordinasi lebih matang antar tim yang melaksanakan kegiatan
Psikoedukasi terhadap siswa perjenjang kelas dan psikoedukasi untuk guru
Monev dan membentuk Keluarga 2 P di tiap Kecamatan
Monitoring dan pendampingan

Akan di lakukan perektutan dan penggantian Administrasi di karenakan sangat di
Akan di lakukan perektutan dan penggantian Administrasi di karenakan sangat di
Peningkatan SDM Bagi Puspaga Tetap terus di tingkatkan dengan mengikuti Peningkatan SDM melalui Lembaga penyelenggara di luar Kementerian PPPA dan Dinas Pengampuh PPA
Pada tahun 2023 akan dilaksanakan Evaluasi RAD yang telah dibuat oleh SKPD Tim Gugus Tugas KLA
<b>Evaluasi Tahun 2023 dalam peringatan HAN bisa meminjam tempat yang lebih</b>

<p>Evaluasi Tahun 2023 akan melaksanakan kegiatan Pelatihan lagi bagi Forum Anak baik tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan kampung dalam rangka peningkatan kapasitas sdm bagi Forum Anak yang ada di Kabupaten Berau</p>
<p>Penambahan anggaran dan pelatihan kemandirian disabilitas dilaksanakan setiap tahun</p>
<p>Setiap tahun perlu peningkatan Kapasitas SDM FPABK, Dalam upaya melatih kemandirian keluarga</p>
<p>Bersurat ke kampung TI Semanting untuk membuatkan Revisi SK PATBM</p>
<p>Semua Kasus yang dilaporkan ke UPT PPA dapat tertangani dan di lakukan pendampingan</p>

Agar peserta lebih konsentrasi pada pelatihan sebaiknya pelatihan dilaksanakan di Luar Daerah

[illegible]

Tersedianya Anggaran WIFI di DPA Dinas PPKBPPPA Kabupaten Berau untuk 4 (empat) Balai Penyuluhan KB

Di prioritaskan pada momen -  
momen penting di tahun 2023

Melakukan monev ke 3  
Kecamatan yaitu :Kecamatan  
Kelay, Kecamatan Tubaan,  
dan Kecamatan Pulau

Tidak Ada

Pergeseran, bisa terlaksana di bln  
Mei, tetap mengakomodir Jan -  
Nov

Shariing dengan anggaran keg. lain di Sub. Koordinasi yang sama
Pinjam ke BKKBN Prov. Kaltim
Tidak Ada



